

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Halal Tourism

a. Pengertian Pariwisata Halal

Menurut Oka A Yoeti kata pariwisata berasal dari dua kata yaitu “*pari*” dan “*wisata*” dan merupakan sinonim dari kata “*tour*”. Kata “*pari*” mempunyai arti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan kata “*wisata*” mempunyai arti perjalanan atau berpergian. Dengan demikian, kata pariwisata mempunyai arti perjalanan yang dilakukan berkali-kali.¹

Kata wisata memiliki arti darma wisata atau pariwisata. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa makna dari wisata adalah suatu perjalanan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan makna dari kata pariwisata adalah suatu kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha yang didukung dengan memberikan berbagai fasilitas dan layanan kepada wisatawan.²

Menurut Spilane pariwisata adalah perjalanan yang bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan melalui dimesi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata menurut Fandeli bermakna perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain bukan untuk mencari nafkah

¹ Muhammad Djakfar, “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia” (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 27.

² Muhammad Djakfar, “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia”, 26.

namun untuk menciptakan kesegaran baik fisik maupun psikis.³

Pengertian dari pariwisata juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata. Pariwisata adalah:

Sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik seta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut pengertian tersebut terdapat lima unsur dalam pariwisata, yaitu unsur manusia (wisatawan), unsur kegiatan (perjalanan), unsur motivasi (motivasi), unsur sasaran (obyek dan daya tarik wisata), dan unsur usaha.⁴

Menurut Pendit, pariwisata memiliki tujuh jenis yang dibedakan menurut motif wisatawan dalam mengunjungi suatu tempat atau objek wisata, yaitu:

- 1) Wisata budaya yaitu perjalanan wisata yang dilakukan untuk mengunjungi tempat-tempat yang berada di dalam maupun luar negeri untuk memperelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni yang ada di tempat tersebut.
- 2) Wisata maritim atau bahari yaitu jenis wisata yang berkaitan dengan kegiatan olahraga air, seperti memancing, berlayar, menyelam, dll. Indonesia memiliki beberapa tempat yang memiliki potensi wisata maritim yang bagus misalnya Danau Toba, pantai di Pulau Bali taman laut di Kepulauan Maluku, dll.
- 3) Wisata cagar alam (taman konservasi) yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh biro perjalanan yang objek wisatanya dikhususkan ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan

³ M. Zaky Mubarak Lubis , "Prospekdestinasi Wisata Halalberbasis Ovop (One Village One Product)", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018): 34, diakses pada 01 Februari 2020, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97873310930439002>.

⁴ I Ketut Setia S. dan Nengah Landra, "Bisnis Pariwisata" (Bali: Noah Aletheia, 2018), 2.

lindung, dll yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

- 4) Wisata konvensi yaitu jenis wisata yang menyediakan fasilitas berupa bangunan yang digunakan untuk tempat bersidang para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi, atau pertemuan yang memiliki lingkup nasional maupun internasional. Contoh wisata konvensi, yaitu Pusat Kongres Internasional (*International Convention Center*) di Berlin, PICC (*Philippine international Convention Center*) di Philipina, Balai Sidang Senayan di Indonesia, dll.
- 5) Wisata pertanian (agrowisata) yaitu perjalanan wisata yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dll yang ditujukan untuk wisatawan yang ingin melakukan peninjauan untuk studi maupun hanya untuk melihat-lihat dan menikmati segarnya tanaman yang terdapat di objek wisata yang dikunjungi.
- 6) Wisata buru yaitu jenis wisata yang melakukan kegiatan berburu binatang-binatang yang diperbolehkan untuk diburu. Wisata ini dilakukan ditempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah suatu negara, seperti menembak banteng dan babi hutan di daerah Baluran, Jawa Tmur.
- 7) Wisata ziarah yaitu jenis wisata yang berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan maupun kelompok ke tempat-tempat yang diagungkan, seperti makam-makam pemimpin atau orang besar, tempat-tempat suci atau dikeramatkan, dll. Indonesia memiliki tempat-tempat suci atau keramat, misalnya Candi Borobudur, makam Wali Songo, makam Bung Karno, Gunung Kawi, dll.⁵

Sedangkan kata Halal berasal dari bahasa Arab yang bermakna diizinkan atau dibolehkan. Sedangkan pengertian halal menurut manjelis ulama Indonesia (MUI) adalah semua yang dibolehkan oleh syariat untuk

⁵ I Ketut Setia S. dan Nengah Landra, "Bisnis Pariwisata", 6-11.

dikonsumsi. Menurut kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, pengertian halal yaitu sah untuk dikerjakan dan dikonsumsi.⁶

Terminologi yang digunakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menyebut *halal tourism* adalah *Islamic Tourism*. Pengertian dari *Islamic Tourism* menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah perjalanan wisata yang memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan kaidah Islam bagi wisatawan Muslim. Terdapat beberapa istilah yang bisa digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*.⁷

Sedangkan Global Muslim Travel Index selaku lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia memberikan definisi *halal tourism* sebagai pariwisata yang memberikan fasilitas dan pelayanan yang ramah kepada wisatawan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *halal tourism*, seperti memberikan fasilitas berupa tempat ibadah yang baik, toilet dengan air yang bersih, tersedianya makanan dan minuman dengan label halal, layanan maupun fasilitas pada saat bulan ramadan, tidak terdapat minuman yang diharamkan oleh ajaran Islam, serta layanan penginapan yang dibedakan antara perempuan dan laki-laki.⁸

Pengertian pariwisata syariah atau halal menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

⁶ Muh Zaini, "Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)", (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 34.

⁷ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2, (2018): 54, diakses pada tanggal 05 September 2020, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/5979>.

⁸ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)", 54.

(MUI) adalah kegiatan wisata yang fasilitas dan layanan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Sedangkan untuk objek wisata atau destinasi wisata halal memiliki makna suatu kawasan yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya, serta adanya masyarakat yang saling terikat satu sama lain demi terwujudnya pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹⁰

Menurut Toeman, wisata halal lebih ditekankan pada penyediaan produk halal yang dapat dinikmati wisatawan muslim dan non muslim. Bagi wisatawan muslim, wisata tersebut memberikan ketenangan dan keamanan baik dari segi makanan, akomodasi, dll. Sedangkan bagi non muslim, wisata tersebut memberikan salah satu solusi hiburan yang menyenangkan untuk keluarga, aman, jauh dari pengaruh negatif tempat hiburan biasa. Sedangkan, menurut pendapat Sofyan wisata halal selain memberikan rasa aman, halal, nyaman, tetapi juga memberikan produk yang sehat karena sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tidak mengandung unsur bahaya baik bagi manusia dan lingkungan.¹¹ Sofyan menjelaskan pariwisata halal memiliki tujuh kriteria umum, yaitu: memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum; memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; menghindari kemusyrikan; bebas dari maksiat; menjaga keamanan dan kenyamanan; menjaga kelestarian lingkungan; dan

⁹ Mariska Ardilla Faza, "Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 19, No.1 (2019): 12, diakses pada tanggal 05 September 2020, <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1992>.

¹⁰ Muh Zaini, "Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)", 35.

¹¹ Gustina, dkk. "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, Vol. 11, No. 2 (2019): 124, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jipb/article/view/254>.

menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹²

Sandaran normatif yang dijadikan sebagai landasan *halal tourism* adalah Al-Qur'an dan Sunnah, karena Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam ekonomi Islam. Masalah wisata merupakan bagian dari muamalah yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia. Selain itu sandaran normatif yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Pariwisata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hukum (fiqih), pendapat para pakar ekonomi syariah, ajaran *Maqadis Syariah*, dan kearifan lokal.¹³

Terdapat beberapa ayat Al-Qura'an yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, diantaranya:

1) Surat An-Nuh Ayat 19-20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لَّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجْجًا

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.¹⁴

2) Surat Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan

¹² Yudhi Martha Nugraha, "Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing Di Kepulauan Riau", *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 3, No. 2 (2018): 64, diakses pada tanggal 01 Maret 2020, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/653041>.

¹³ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 33.

¹⁴ Al-Qur'an, An-Nuh ayat 19-20, Al-Qur'an Terjemah.

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁵

3) Surat Al-Ankabut Ayat 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
الْبَشَرَةَ الْأَخْرَجَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁶

Penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas adalah Allah memerintahkan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan juga bermakna Al-Qur’an memuji orang-orang yang melakukan kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kegiatan wisata dapat digunakan untuk merenungi keindahan ciptaan Allah, menikmati indahnya alam sehingga dapat mendorong jiwa manusia untuk lebih menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah.

Syaikh Al-Munajjid juga mendefinisikan tentang bagaimana sebuah wisata menjadi wisata yang Islami. Beliau membaginya kedalam lima hal yang menghalalkan suatu wisata, yaitu:¹⁷

- 1) Jika kegiatan wisata dikaitkan dengan ibadah.
- 2) Jika kegiatan wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan.
- 3) Jika kegiatan wisata dikaitkan dengan pengambilan hikmah dan pelajaran.
- 4) Jika kegiatan wisata dikaitkan dengan sarana dakwah.

¹⁵ Al-Qur’an, Al-Jumuah ayat 10, Al-Qur’an Terjemah.

¹⁶ Al-Qur’an, Al-Ankabut ayat 20, Al-Qur’an Terjemah.

¹⁷ Muh Zaini, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)", 37.

5) Jika kegiatan wisata dikaitkan dengan merenengi serta mengagungkan keindahan ciptaan Allah.

Namun dalam masalah wisata halal harus lebih mempertimbangkan Hukum Islam (fiqih) dibanding dengan hukum negara. Karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti bersinggungan dengan perkara halal dan haram, baik oleh pihak penguasa selaku pembuat kebijakan maupun pihak pelaksana selaku pihak yang secara langsung melakukan. Tetapi perundangan nasional juga perlu dikedepankan tentang bagaimanakah posisi wisata halal di Indonesia karena perundang-undangan yang mengatur tentang wisata halal belum lahir.¹⁸

Indonesia belum memiliki perundangan yang secara khusus mengatur tentang wisata halal. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum tentang wisata halal yang berdasarkan dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merumuskan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.¹⁹

b. Ketentuan Pariwisata Halal

DSN-MUI sudah membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan wisata halal di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Ketentuan hukum dan prinsip umum

Ketentuan hukum dalam penyelenggaraan wisata halal harus berdasarkan prinsip syariah, maka boleh dilakukan sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah difatwakan. Jika dalam penyelenggaraannya bertentangan dengan prinsip syariah, maka akan berujung pada larangan untuk dilakukan. Sedangkan sesuai dengan prinsip umum, penyelenggaraan wisata wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar. Sebaliknya penyelenggaraan wisata harus

¹⁸ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 33.

¹⁹ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 171.

menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual bagi para wisatawan.²⁰

2) Ketentuan destinasi wisata

Menurut fatwa DSN-MUI terdapat tiga pokok kewajiban untuk destinasi atau objek wisata. **Pertama**, upaya yang wajib dicapai seperti mewujudkan kemaslahatan umum; mendapatkan pencerahan, penyegaran penenangan; memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan; memelihara kebersihan lingkungan; dan menghormati nilai-nilai social budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. **Kedua**, fasilitas yang harus dimiliki yaitu tempat ibadah yang layak pakai dan mudah dijangkau, tersedianya makanan dan minuman halal yang dijamin kehalalannya. Selanjutnya yang **ketiga**, yaitu upaya yang harus dihindari seperti hal-hal yang menjurus pada kemusyrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.²¹

3) Ketentuan infrastruktur pendukung

Salah satu infrastruktur akomodasi yang digunakan untuk mendukung wisata halal adalah hotel. Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses tentang pornografi dan asusila yang dapat merusak moral termasuk fasilitas hiburan tidak mengarah pada kemusyrikan. Bahkan setiap hotel diwajibkan menyediakan fasilitas tempat ibadah yang memadai, dan juga fasilitas air yang bisa digunakan untuk bersuci.²²

²⁰ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 174-175.

²¹ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 176.

²² Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", 177.

2. Analisis SWOT

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan suatu organisasi serta peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi yang disajikan dengan mengkombinasikan keempatnya. Suatu organisasi dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga strategi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada, sekaligus dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada untuk menghindari dari ancaman yang ada.²³

Menurut Rangkuti, Analisis SWOT adalah identifikasi semua faktor dengan sistematis guna merumuskan suatu strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan, dimana suatu perusahaan harus sanggup untuk memaksimalkan semua kekuatan (*strength*) dan semua peluang (*opportunities*) sehingga bisa meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT digunakan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada internal organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada pada eksternal organisasi.²⁴

Analisis SWOT dapat membantu perusahaan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan berupa strategi untuk memajukan perusahaan. Analisis SWOT bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan semua kekuatan dan peluang yang dimiliki, sekaligus meminimalkan semua kelemahan dan ancaman yang ada. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis suatu kasus

²³ Arif Yusuf Hamali, "Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 107.

²⁴ Nunung Bayu Aji, "Analisis Swot Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah Sma Swasta Di Kota Tangerang", *Jurnal Operation Excellence*, Vol. 10, No. 1 (2018): 67, diakses pada tanggal 05 September 2020, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/oe/article/view/3152>.

yang ada di perusahaan ataupun menyusun rencana yang akan digunakan oleh perusahaan yang sifatnya strategis.²⁵

Analisis SWOT dapat diterapkan dalam berbagai lingkup, dimulai dari individu, perusahaan, bahkan daerah maupun negara. Analisis SWOT dalam lingkup individu digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai cita-cita. Analisis SWOT dalam lingkup perusahaan digunakan untuk membuat rencana strategis untuk mencapai keuntungan. Sedangkan analisis SWOT dalam lingkup yang lebih besar atau bisa disebut sebagai negara, analisis SWOT juga dapat digunakan. Misalnya Negara Turki yang mengaplikasikan analisis SWOT untuk mewujudkan *e-government*.²⁶

Ketika melakukan analisis SWOT terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan guna mendapatkan strategi yang baik, yaitu:

- a. Menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matriks SWOT

Matriks SWOT yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu peluang dan ancaman yang ada lalu disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sebagai berikut:²⁷

Tabel 3.1
Matriks Analisis SWOT

	Strength (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	Weakness (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
--	--	---

²⁵ Nunung Bayu Aji, "Analisis Swot Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah Sma Swasta Di Kota Tangerang", 67.

²⁶ Mariska Ardilla Faza, "Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat", Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 19, No.1 (2019): 15, diakses pada tanggal 05 September 2020, <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1992>.

²⁷ Irham Fahmi, "Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi", (Bandung: ALFABETA, 2014), 265.

<p>Opportunities (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi</p>	<p>Srategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada</p>	<p>Strategi WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.</p>
<p>Threats (T) Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi</p>	<p>Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman</p>	<p>Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman</p>

Iskandar Putong mengatakan bahwa, jika nilai peringkat dan pembobotan dikalikan maka akan diperoleh hasil kombinasi untuk beberapa situasi sebagai berikut:

1. *Strenght* dan *Opportunities* (SO), artinya organisasi dapat menentukan strategi melalui kombinasi kekuatan dengan peluang sehingga dapat memanfaatkan kekuatan dengan menggunakan peluang yang ada.
2. *Weakness* dan *Opportunities* (WO), artinya organisasi dapat menentukan strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada dengan cara memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
3. *Strenght* dan *Threats* (ST), artinya organisasi dapat menentukan strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada.
4. *Weakness* dan *Threats* (WT), artinya organisasi dapat menentukan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.²⁸

²⁸ Irham Fahmi, “Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi”, 264.

- b. Menyusun dan menentukan faktor-faktor strategis eksternal dan internal suatu perusahaan

Pearce dan Robinson mengembangkan perhitungan Analisis SWOT untuk mengubah data SWOT yang berbentuk kualitatif diubah menjadi bentuk kuantitatif, sehingga diketahui posisi perusahaan sesungguhnya. Matriks Analisis SWOT memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah skor bobot kekuatan (*Strength*) dikurangi kelemahan (*weakness*), sedangkan sumbu Y adalah skor bobot peluang (*opportunities*) dikurangi ancaman (*treath*). Setelah mengetahui titik untuk sumbu X dan sumbu Y, akan diketahui posisi atau kedudukan strategi perusahaan pada kuadran berapa. Terdapat empat kuadran strategi dan evaluasi yang berbeda-beda, yaitu:²⁹

1. Kuadran I (positif, positif), artinya pada posisi ini perusahaan atau organisasi memiliki kekuatan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang digunakan yaitu "Strategi Progresif", yang bermakna perusahaan dalam kondisi yang baik sehingga dapat terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.
2. Kuadran II (positif, negatif), artinya pada posisi ini perusahaan atau organisasi memiliki kekuatan yang kuat tetapi sedang menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang digunakan yaitu "Strategi Diversifikasi", yang bermakna perusahaan atau organisasi dalam kondisi yang baik tetapi sedang menghadapi beberapa tantangan yang berat sehingga diperkirakan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya jika hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi disarankan untuk menambahkan beberapa strategi taktisnya.
3. Kuadran III (negatif, positif), artinya pada posisi ini perusahaan atau organisasi sedang melemah tetapi memiliki peluang yang baik. Rekomendasi strategi

²⁹ Nunung Bayu Aji, "Analisis Swot Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah Sma Swasta Di Kota Tangerang", 68.

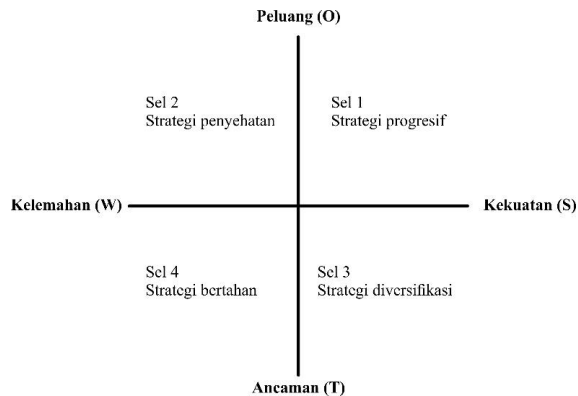
yang digunakan yaitu "Strategi Penyehatan atau ubah strategi", yang bermakna perusahaan disarankan untuk mengubah strategi yang digunakan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena ditakutkan strategi sebelumnya akan sulit dalam menangkap peluang yang ada dan juga dapat memperbaiki kinerja perusahaan atau organisasi.

4. Kuadran IV (negatif, negatif), artinya pada posisi ini perusahaan atau organisasi sedang melemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang digunakan yaitu "Strategi Bertahan", yang bermakna perusahaan sedang dalam kondisi dilematis. Sehingga perusahaan disarankan untuk melakukan strategi bertahan agar dapat mengendalikan kinerja internal. Ketika strategi ini dipertahankan, maka perusahaan atau organisasi harus tetap berupaya membenahi diri.³⁰

Pehitungan bobot diberikan nilai 1-3. Nilai 3 bermakna sangat penting, nilai 2 bermakna penting, dan nilai 1 bermakna tidak penting. Sedangkan perhitungan rating diberikan nilai 1-4. Penilaian rating untuk faktor kekuatan sebagai berikut: 4 bermakna sangat baik, 3 bermakna baik, 2 bermakna kurang baik dan 1 bermakna tidak baik, sedangkan untuk faktor kelemahan nilai 4 bermakna tidak baik, 3 bermakna kurang baik, 2 bermakna baik dan 1 bermakna sangat baik. Pehitungan nilai skor diambil dari bobot dikalikan dengan rating. Berikut gambar diagram Analisis SWOT

³⁰ Nunung Bayu Aji, "Analisis Swot Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah Sma Swasta Di Kota Tangerang", 68.

Gambar 2.1
Diagram Analisis SWOT



3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Pendapatan)

Pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pendapatan diantaranya berasal dari sektor pariwisata. Sehingga semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan ke suatu daerah, maka akan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena semakin tinggi permintaan barang dan jasa sehingga tercipta lapangan kerja untuk masyarakat. Jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan bekerja.³¹

Pendapatan merupakan indikator yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan seseorang karena dengan memiliki pendapatan yang baik maka seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Terdapat perbedaan pendapatan dari satu orang dengan orang lainnya, hal ini disebabkan karena jumlah tanggungan keluarga. Seseorang

³¹ Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, (2018): 156, diakses pada tanggal 05 September 2020, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1303>.

yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang besar akan mengeluarkan tingkat pendapatan yang besar, begitupun juga jika seseorang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang kecil akan mengeluarkan tingkat pendapatan yang kecil. Pendapatan perkapita perbulan dari suatu keluarga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang.³²

Definisi pendapatan menurut Sumardi adalah seluruh pemasukan baik yang berupa uang ataupun benda yang berasal dari hasil sendiri maupun dari pihak luar yang dinilai dengan sejumlah harga yang berlaku dengan bentuk uang.³³ Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu.³⁴

Pendapatan seseorang atau suatu keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat mempengaruhi pola gerak hidup dan interaksi seseorang di masyarakat, hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima akan mempengaruhi daya beli terhadap kebutuhan hidupnya. Jika seseorang mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok lebih baik dan ekonomi keluarganya terpenuhi, begitupun sebaliknya. Keluarga sejahtera adalah

³² Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9, No. 1 (2017): 60, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/viewFile/6038/5367>.

³³ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", 60.

³⁴ I Gusti Bagus Yogi Sutanegara Bagiana dan I Nyoman Mahaendra Yasa, "Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayanan*, Vol. 6, No. 9 (2017): 1842, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/31820/20982>.

keluarga yang dapat memnuhi secara seimbang dan berkelanjutan semua jenis kebutuhannya.³⁵

Todaro berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah bisa dilihat dari tingkat kehidupan masyarakat itu sendiri. Tingkat kehidupan masyarakat ditandai dengan mempunyai tingkat pendapatan yang mencukupi, tingkat kesehatan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan juga tingkat produktivitas masyarakat.³⁶

Terdapat beberapa simpulan yang disimpulkan oleh Ridhwan terhadap beberapa studi mengenai sektor pariwisata, yaitu: sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi baru yang lebih tahan terhadap ekonomi yang tidak stabil, sektor pariwisata juga bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dan sektor pariwisata lebih menghasilkan devisa yang lebih cepat daripada devisa dari sektor ekspor barang yang harus memproduksi barang terlebih dahulu baru bisa dijual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan sektor pariwisata.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang termasuk kegiatan pariwisata, yaitu:

- a. Jasa yang memberika daya tarik wisata, artinya semua yang memiliki keunikan, keunikan, dan nilai yang berwujud keragamaa, kekayaan alam, nudaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan rekreasi atau kunjungan wisatawan.
- b. Jasa yang kegiatannya membangun atau mengelola untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa transportasi wisata, usaha menyediakan transportasi untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

³⁵ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", 60.

³⁶ I Gusti Bagus Yogi Sutanegara Bagiana dan I Nyoman Mahaendra Yasa, "Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli", 1843.

³⁷ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 178-179.

- d. Jasa perjalanan wisata seperti biro dan agen perjalanan wisata.
- e. Jasa penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, kafe, rumah makan, dan bar atau kedai minuman.
- f. Jasa penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan penginapan seperti vila, hotel, pondok wisata atau akomodasi lainnya yang bisa digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g. Jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang kegiatannya berupa pertunjukan, bioskop, karaoke, atau kegiatan lain yang bertujuan sebagai pariwisata.
- h. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran.
- i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, serta hasil penelitian tentang pariwisata yang disebarluaskan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
- j. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan tenaga pemandu wisata untuk membantu wisatawan atau biro perjalanan dalam menjelaskan tentang wisata tersebut.
- k. Wisata air adalah usaha yang menyediakan olahraga air maupun wisata air termasuk sarana dan prasarana yang bertempat di perairan laut, danau, pantai, sungai, dan waduk.
- l. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan kepada wisatawan berupa terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, dan olahraga fisik yang bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga namun tetap memperhatikan budaya dan tradisi yang ada.³⁸

Namun ke-13 jenis pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya tersebut tidak akan dapat berkembang jika tidak mendapatkan dukungan dari sektor-sektor pendukung lain, seperti sektor transportasi dan komunikasi, jasa kebersihan, jasa keamanan, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi, dll. Sektor-sektor pendukung tersebut juga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan

³⁸ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 179-181.

pendapatan masyarakat desa. Bisa dikatakan sektor pariwisata dan sektor pendukung saling membutuhkan, maksudnya sektor pariwisata membutuhkan barang dan jasa dari sektor pendukung lalu sektor pendukung membutuhkan sektor pariwisata untuk mengeluarkan atau menjual barang atau jasa yang dimiliki. Selanjutnya, masyarakat desa yang bekerja akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari sektor pariwisata maupun sektor pendukung lainnya, lalu pendapatan tersebut akan dibelanjakan untuk membeli produk dari sektor pariwisata maupun sektor pendukung lainnya. Dengan kata lain, dengan adanya sektor pariwisata di suatu desa maka kesempatan kerja, pendapatan, dan permintaan pasar di suatu desa akan meningkat.³⁹

Peran sektor pariwisata tidak hanya berimbas pada pendapatan masyarakat saja, melainkan juga berimbas kepada pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata dan sektor pendukung lainnya berupa berbagai retribusi dan lain-lain yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).⁴⁰

4. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu pedesaan yang memberikan konsep pariwisata berupa kearifan lokal yang dimiliki oleh desa tersebut baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, dll yang memiliki komponen berupa atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung.⁴¹ Terdapat dua komponen terpenting yang harus ada dalam desa wisata yaitu akomodasi dan atraksi. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal penduduk atau unit-unit yang berkembang sesuai ketentuan dan atraksi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga setempat beserta latar

³⁹ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 181-182.

⁴⁰ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 183.

⁴¹ Titing Kartika, dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat", *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 2, No. 1, (2019): 13, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, <https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/16427>.

fisik lokasi desa yang dapat menjadikan wisatawan ikut berperan aktif contohnya kursus tari, bahasa, lukis, dll.⁴²

Menurut Aryadji dalam tulisannya di *Berdesa.com*, saat ini desa wisata menjadi salah satu bentuk yang diminati oleh desa dalam membangun desanya. Menurutnya desa wisata akan terus diburu mengingat kemajuan zaman yang serba modern di daerah kota. Dalam tulisannya, Aryadji menyebutkan beberapa alasan yang mendasari tentang pendapatnya mengenai masa depan desa wisata yang akan gemilang, yaitu:

- a. Desa wisata memberikan suguhan pemandangan alam yang menyejukkan mata bagi para wisatawan yang melihatnya, yang tidak bisa didapat di daerah perkotaan. Desa wisata memberikan suasana yang akan selalu dirindukan oleh wisatawan, sehingga dengan dorongan rindu tersebut wisatawan akan berlomba-lomba pergi berwisata ke desa.
- b. Suasana alami yang disuguhkan oleh desa wisata tidak bisa digantikan oleh bangunan apapun. Meskipun wisata modern banyak didirikan, tetapi suasana alami yang dimiliki oleh desa wisata tetap akan menjadikan para wisatawan betah berada di sana.
- c. Keramahan sikap yang dimiliki oleh warga desa terhadap para wisatawan yang tidak didapatkan jika berada di perkotaan.
- d. Desa wisata juga memberikan edukasi bagi para wisatawan disegala usia.⁴³

Meskipun demikian, Aryadji juga berpendapat tidak semua desa dapat dijadikan sebagai desa wisata. Karena untuk menjadi desa wisata, suatu desa harus memenuhi syarat atau aspek produk desa wisata. Berikut empat syarat

⁴² Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat", *PROSIDING KS: RISET & PKM*, Vol. 2, No. 1: 40, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, <https://www.coursehero.com/file/55173935/14221-31862-1-SMpdf/>.

⁴³ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 216-217.

atau aspek yang harus dimiliki suatu desa jika ingin menjadi desa wisata, yaitu:

a. Keaslian

Keaslian produk desa wisata merupakan aspek yang sangat penting karena potensi tersebut akan menjadi *branding* dalam mempromosikan desa wisata. Desa wisata juga harus memiliki potensi yang autentik, maksudnya desa wisata tersebut memiliki potensi alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan dapat dikembangkan sehingga berbeda dengan objek wisata lainnya. Contohnya seperti air terjun, danau (baik yang asli maupun yang buatan), agrowisata, dll. Promosi desa wisata juga bisa dilakukan dengan memberikan nama dengan memperhatikan kearifan lokal yang terdapat di desa tersebut.

b. Tradisi lokal

Tradisi lokal merupakan tradisi yang telah ada dan turun-temurun di suatu desa. Karena sudah turun-temurun, tradisi tersebut dianggap sudah melekat pada masyarakat dan juga dianggap sebagai kearifan lokal. Tradisi lokal dan kearifan lokal masyarakat desa tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

c. Sikap dan nilai

Sikap dan nilai juga merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki, karena masyarakat harus siap dengan perubahan yang akan muncul jika banyak wisatawan yang berkunjung dengan berbagai macam budaya dan kebiasaan yang mereka bawa. Masyarakat harus mampu memfilter budaya dan kebiasaan yang dibawa oleh wisatawan, sehingga tidak merusak sikap dan nilai kearifan lokal yang ada di desa tersebut.

d. Konservasi dan daya dukung

Konservasi dan daya dukung bertujuan untuk pengembangan lokasi desa wisata dapat terarah ke masa yang akan datang. Maksudnya lokasi desa wisata tidak hanya menjadi tren sesaat melainkan juga dapat berkembang untuk masa yang akan datang, karena

adanya pengelolaan untuk menjaga dan mengembangkan potensi desa wisata tersebut.⁴⁴

Menurut Ridhwan, terdapat dua permasalahan yang menyebabkan banyak daerah di Indonesia yang belum berhasil dalam mengembangkan sektor pariwisatanya, yaitu:

a. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan meliputi dua lingkup yaitu formal maupun informal. Faktor kelembagaan formal berkaitan dengan instansi daerah yang menangani sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya banyak daerah yang tidak memiliki pimpinan yang baik, banyak daerah yang masih berhadapan dengan masalah hutan lindung, dll. Sedangkan faktor kelembagaan informal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, budaya, norma, dan tradisi.

b. Faktor keamanan

Faktor keamanan disini maksudnya daerah di Indonesia masih rawan tindak kejahatan, ketidakjujuran, dll sehingga menghalangi potensi pariwisata yang sangat besar.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul "Potensi Halal Tourism dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang" bertujuan untuk mengetahui berpotensi atau tidakkah Desa Wisata Lerep untuk dijadikan sebagai Desa Wisata Halal (DWH) dan juga bagaimana potensi peningkatan ekonomi masyarakat dalam penerapan *halal tourism* di Desa Wisata Lerep. Sebagai bahan perbandingan, pelengkap, dan untuk menghindari duplikasi, peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

⁴⁴ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 218-219.

⁴⁵ Tulus T.H Tambunan, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", 219-220.

No	Keterangan	Pembahasan
1	Nama, Judul, (Nama Jurnal, Volume, No. Tahun)	Hary Hermawan, “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal”, (Jurnal Pariwisata Vol.3 No.2, 2016).
	Hasil	Pengembangan desa wisata yang dilakukan di Desa Nglanggeran ternyata berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal, dan indikasi dampak negatif berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan.
	Perbedaan	Penelitian ini hanya membahas tentang desa wisata saja, tidak juga membahas tentang potensi <i>halal tourism</i> atau wisata halal yang terdapat di Desa Wisata Nglanggeran.
	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 2. Objek yang digunakan sama dengan peneliti yaitu desa wisata.
2	Nama, Judul, (Nama Jurnal, Volume, No. Tahun)	Otto Andri Priyono, “Halal Tourism Opportunities And Challenges In East Java”, (Jurnal Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman Vol. 4 No.2, 2018).
	Hasil	Jawa Timur memiliki potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i> , namun dalam mengembangkan potensi wisata halal diperlukan beberapa strategi khusus guna mengoptimalkan potensi wisata halal yang ada.
	Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini tidak membahas tentang pengaruh potensi wisata halal terhadap perekonomian masyarakat.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penelitian ini membahas tentang potensi dan tantangan pariwisata halal atau <i>halal tourism</i> di Jawa Timur. 3. Penelitian ini membahas tentang potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i> secara luas, tidak merujuk pada suatu objek wisata.
	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 2. Sama-sama membahas tentang potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i>.
3	Nama, Judul, (Nama Jurnal, Volume, No. Tahun)	Krishna Anugrah dkk., “Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo”, (Jurnal PESONA Vol.2 No.2, 2017).
	Hasil	Keberadaan restoran halal atau kedai makanan dan minuman halal di kota Gorontalo sudah dikatakan cukup memadai untuk mendorong dilaksanakannya pariwisata halal di kota Gorontalo.
	Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini hanya membahas salah satu ketentuan wisata halal yang diberikan oleh MUI yaitu tentang ketersediaan makanan dan minuman halal. 2. Objek yang digunakan tidak desa wisata. 3. Penelitian ini tidak membahas tentang pengaruh potensi wisata halal terhadap perekonomian masyarakat.
	Persamaan	Pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif.

4	Nama, Judul, (Nama Jurnal, Volume, No. Tahun)	Gustina, dkk., “Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, (Jurnal Ilmiah Poli Bisnis Vol. 11 No. 2, 2019).
	Hasil	Masyarakat di sekitar PAM termasuk pelaku usaha merasakan potensi wisata halal yang dimiliki oleh PAM (Pemandian Air Panas) dalam meningkatkan peluang kerja, kesempatan berusaha, dan juga kesejahteraan masyarakat.
	Perbedaan	Penelitian ini membahas tentang potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i> yang terdapat di PAM bukan desa wisata.
	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang digunakan sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Sama-sama membahas tentang potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i>. 3. Sama-sama membahas tentang pengaruh potensi wisata halal atau <i>halal tourism</i> terhadap perekonomian masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang berjudul Potensi *Halal Tourism* Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema dibawah ini.

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir Penelitian

